



Judul : Mendag Minta Maaf soal Mafia
Tanggal : Jumat, 18 Maret 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Mendag Minta Maaf soal Mafia

Dugaan penimbunan minyak goreng ditemukan Menteri Perdagangan antara lain di tiga daerah, yaitu Medan, Surabaya, dan Jakarta.

INSI NANTIKA JELITA
insi@mediaindonesia.com

MENTERI Perdagangan (Mendag) Muhamad Lutfi menyinggung keberadaan mafia yang diduga menimbun dan mengirintikan minyak goreng ke luar negeri. Ia pun meminta maaf karena tidak dapat mengontrol hal tersebut.

Hal itu diutarakannya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi VI DPR, kemarin. "Ada orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil minyak ini. Contoh masuk ke industri, padahal konsumsi masyarakat sekitar 1,8 juta liter per bulan, diselundupkan ke luar negeri oleh mafia," jelas Mendag.

"Mohon maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Ini sedang diperiksa Satgas Pangan," tambahnya.

Akan tetapi, Lutfi menegaskan pihaknya tetap berupaya menangkap mafia minyak goreng tersebut. Lutfi menyebut akan mengungkapkan nama-nama mafia tersebut pada Senin (21/3).

Dugaan penimbunan minyak goreng itu ditemukan Mendag di tiga daerah. Di Sumatera Utara, misalnya, sepanjang 14 Februari-16 Maret, wilayah itu tercatat mendapat pasokan 60,4 juta liter. "Padahal rakyat di Sumatera Utara menurut BPS di 2021 ada 15,18 juta orang. Kalau dibagi, ini setara dengan kira-kira 4 liter per orang dalam sebulan," ucapnya.

Di Medan, lanjut Lutfi, minyak goreng dipasok 25 juta liter dalam sebulan. Jika dikalkulasi, setiap warga Medan mendapat 10 liter. Namun, saat Mendag mengecek ke lapangan, minyak goreng tidak ditemui. Hal serupa terjadi di Jakarta dengan pendistribusian hingga 85 juta liter dan Surabaya dengan total 91 juta liter minyak goreng.

Kementerian Perdagangan memiliki dua indikasi terhadap kasus itu. "Ada orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempatan. Tiga kota itu, apa *common dominators*-nya? Satu, industri ada di sana. Kedua, ada pelabuhan," kata Lutfi.

Mendag menduga ada penyelundupan minyak goreng yang diproduksi dengan harga

crude palm oil (CPO) kebijakan *domestic price obligation* (DPO) yang jauh di bawah harga internasional, tapi tidak dijual di dalam negeri, melainkan ke luar negeri dengan selisih harga mencapai Rp8.000 per liter. "Jadi kalau ini pelabuhan, satu tongkang bisa 1.000 ton, dikali Rp7.000 atau Rp8.000, uangnya bisa Rp8 miliar sampai Rp9 miliar," paparnya.

Mendag mengatakan pihaknya telah melaporkan temuan itu kepada Satgas Pangan Polri untuk ditelusuri.

Kasatgas Pangan Polri Irfan Helmy Santika mengemukakan pihaknya membantu pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. "Kami mencoba mencari tahu apa penyebab kelangkaan minyak goreng. Kalau memang ada penyimpangan nanti akan ditindak dengan koordinasi bersama pemerintah."

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai langkah pemerintah yang menggontaganti kebijakan harga minyak goreng dapat merugikan masyarakat. "Dari sisi kebijakan publik, YLKI sangat menyayangkan terkait bongkar pasang kebijakan minyak goreng. Seperti coba-coba sehingga konsumen bahkan operator menjadi korbannya," tegasnya.

Stok melimpah

Setelah pemerintah mencabut ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dan menyerahkan mekanisme harga ke pasar, stok kebutuhan pokok itu di pasaran langsung tersedia cukup banyak.

Dari pemantauan *Media Indonesia* kemarin, minyak goreng di berbagai pasar tradisional dan pasar modern di Jawa Tengah, misalnya, kembali muncul. Namun, harganya terutama untuk minyak goreng kemasan cukup tinggi, yakni dari Rp18 ribu sampai Rp24 ribu per liter.

Kondisi itu mengherankan warga karena sebelumnya stok minyak goreng langka saat HET masih Rp14 ribu per liter. "Dulu minyak goreng langka, sampai harus ada operasi pasar. Sekarang HET dicabut, barangnya muncul," kata Arief, 50, pedagang gorengan di Pasar Sampangan, Semarang. (Sru/Try/Put/Gan/Ant/AS/LD/DG/WJ/AN/KG/X-11)